

DAFTAR PUSTAKA

- Damaledo, Y. D. (2021). *2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu*. tirta.id.
- Dinas, S. (2022). *Visi dan Misi*. Dipetik May 17, 2022, dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen: <https://dlhkp.kebumenkab.go.id/index.php/web/>
- Fatimah Ari Nurul, D. A. (2021). *Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Tahunan Pada Perusahaan LQ45 Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 39-41.
- Rahayu, N. T., & Muharam, H. (2021). The Impact of The Covid-19 Pandemic on Provincial Economic Performance in Indonesia. *Management Analysis Journal*, 10(1), 23–36. <https://doi.org/10.15294/maj.v10i1.43950>
- Sartika, M. (2020). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kehutanan Sumatera Selatan*. Skripsi, 3.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah Andy P., A. E. (2014). *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*.
- Hasanah Nurmalia, A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media.
- Indonesia, K. K. (2020, April 30). *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*. Dipetik 28 Desember 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124*.
- Kementerian, D. N. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*.
- Kementerian, K. (2020). *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*. Jakarta. Dipetik Desember 28, 2021, dari

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>

Kementerian, K. (2021). *Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan Covid 19*. Dipetik Desember 28, 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>

Saputri, R. E. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba*. 1.

Redaksi Manfaat. (n.d.). *7 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik dalam Pemerintahan*. Dipetik Januari 4, 2022, dari <https://manfaat.co.id/manfaat-laporan-realisasi-anggaran>

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Republik, I. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Republik, I. (2019). *Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*.

Mustofa, & I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accountng Anlysis Journal*, 2, 2.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02, tentang *Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas*. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER 42/PB/2014, tentang *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.

Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Study Kasus Skpd Di Provinsi Riau). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1.